

AGAMA DAN KONFLIK SOSIAL

Stephanus Turibius Rahmat

Program Studi PG-PAUD STKIP St. Paulus, Jl. Jend. Ahmad Yani, No. 10, Ruteng – Flores

e-mail: stephan_rahmat@yahoo.com

Abstract: Religion and Social Conflict. Every religion is present as a carrier of love and peace institution for the adherent of that religion. Even though, religion is often regarded as the cause of various social conflict that occur. Religious sentiment is often used for the interest of a groups or certain parties. Religion loses power as a source of spiritual inspiration for each adherent. Therefore, we need to find a new paradigm of religious life and religious position in accordance with the vision and its fundamental mission. All religion need to continuously foster the spirit of tolerance within each adherent, doing constructive interreligious dialogue, as well as striving for peace without violence (non-violence). Thus, religion can appear as an institution that teaches the truth and true peace.

Keywords: religion, social conflict

Abstrak: Agama dan Konflik Sosial. Setiap agama hadir sebagai institusi pembawa cinta dan damai bagi para penganutnya. Walaupun demikian, agama sering direduksi sebagai penyebab dari pelbagai konflik sosial yang terjadi. Sentimen agama sering digunakan untuk kepentingan kelompok atau pihak-pihak tertentu. Agama kehilangan daya sebagai sumber inspirasi rohani bagi para penganutnya. Oleh karena itu, kita perlu mencari paradigma baru hidup beragama dengan memposisikan agama sesuai dengan visi dan misi fundamentalnya. Semua agama perlu secara terus-menerus menumbuhkan semangat toleransi dalam diri setiap penganutnya, melakukan dialog antaragama yang bersifat konstruktif, serta memperjuangkan perdamaian tanpa kekerasan. Dengan demikian, agama dapat tampil sebagai institusi yang mengajarkan kebenaran dan kedamaian yang sejati.

Kata Kunci: agama, konflik sosial

PENDAHULUAN

Semua agama besar yang ada di Indonesia mempunyai visi dan misi dasar yakni mengajarkan kedamaian dan keselamatan bagi pemeluknya. Agama-agama ini lahir dan hadir untuk menjalankan fungsi kritis-profetisnya dan misi pembebasan bagi semua penganutnya. Agama juga memiliki kualitas istimewa dengan mengklaim diri sebagai pemiliki kebenaran absolut yang mengacu pada suatu *Autorita Ilahi* (Allah dengan banyak nama), yang memiliki potensi-potensi kritik dan potensi inovatif karena setiap agama mengacu pada nilai-nilai transenden (Daven, 2013:199-200). Itu berarti setiap agama dapat menjadi pendukung utama cita-cita kemanusiaan universal yang diterima dari Allah. Semua agama mengakui dan memegang teguh keyakinan dasar ini.

Akan tetapi di pihak lain, setiap agama juga memiliki fungsi yang amat problematis. Hal itu tampak dalam konflik-konflik di mana faktor agama memainkan peran yang tidak kecil. Perbedaan tajam *intra*-agama atau *antar*-agama dapat dengan mudah diinstrumentalisasi terutama dalam kondisi krisis untuk tujuan politik dan ekonomi yang sangat bertentangan dengan semangat etis dari agama-agama. Menurut Suseno dalam Daven (2013:201), legitimasi religius terhadap kekuasaan politis dan kekuasaan ekonomis justru mengangkat konflik yang bersifat profan murni ke tingkat yang sakral. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa banyak “konflik sosial” dengan aksi pembunuhan dan kekerasan tidak terutama disebabkan oleh faktor agama *an sich*, melainkan akibat instrumentalisasi politik oleh oknum tertentu. Eskalasi konflik akan

dipercepat kalau elite politik menggunakan simbol-simbol agama dan mengeksploitasi tradisi agama untuk kepentingan politik individu tertentu. Dalam konteks inilah terjadi ambivalensi eksistensi agama yakni disatu sisi agama sebagai institusi pemilik kebenaran yang absolut, tetapi di sisi lain agama memiliki fungsi yang problematis karena sering berhadapan dengan berbagai macam tantangan, tuduhan dan persoalan. Agama kerap kali dicap sebagai biang kerok dari setiap konflik sosial. Agama identik dengan konflik sosial dan kekerasan. Dalam realitas inilah, wajah agama menjadi sangat seram, tidak bersahabat lagi. Eksistensi dan peran positif agama mulai dipertanyakan. Masih layakkah agama mendapat identitas sebagai pembawa damai atau keselamatan? Pertanyaan seperti ini muncul karena agama terkadang dianggap sebagai penyebab disintegrasi bagi kehidupan bersama.

Berhadapan dengan tuduhan seperti itu, kita perlu bersikap kritis sambil tetap berpegang teguh pada prinsip dasar kehadiran agama-agama yakni sebagai penebar damai dan cinta kasih, bukan perang atau kekerasan. Apalagi Allah yang diyakini semua agama tidak pernah mengajarkan atau melegitimasi perang atau kekerasan atas nama agama (perang suci). Tulisan ini berpretensi untuk mencari dan menemukan kembali jawaban atas persoalan entahkah konflik sosial yang terjadi murni konflik bernuansa agama atautkah ada sebab lain, tetapi kaum beragama senggaja memanfaatkan sentimen agama untuk merealisasikan interese pribadi atau kelompok. Bertolak dari persoalan ini, maka penulis mau menawarkan model kehadiran agama di tengah pluralitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin dengan itu, konflik sosial yang mengatasnamakan agama dapat diminimalisasi. Dengan demikian, agama pun boleh hadir dengan citra aslinya sebagai pembebas, pembawa damai, keselamatan bagi setiap penganutnya. Agama-agama sungguh hadir untuk membawa pencerahan dan kegairahan hidup bagi para pemeluknya.

KONFLIK SOSIAL: HARUSKAH AGAMA DIPERSALAHKAN?

Agama sering tampil dengan dua wajah yang saling bertentangan. Ketika agama tampil dengan wajah yang kontradiktif, maka sebenarnya terdapat jarak antara cita-cita agama dengan realitas kehidupan beragama (Haryatmoko, 2010:81). Dari satu sisi, agama merupakan tempat di mana orang menemukan kedamaian, kedalaman hidup, dan harapan

yang kokoh. Agama juga menjadi sumber inspirasi dan memberi motivasi tindak kepahlawanan atau membangkitkan semangat pengorbanan. Di dalam agama, banyak orang menimba kekuatan berhadapan dengan penderitaan, keputusan dan penindasan. Tidak bisa disangkal begitu besar sumbangan agama bagi kemajuan peradapan manusia dan dalam mendidik serta mempertajam makna tanggung jawab. Akan tetapi di sisi yang lain, cukup menyedihkan ketika agama dikaitkan dengan fenomena kekerasan. Atas nama agama orang bisa semena-mena memperlakukan orang lain. Agama dipakai untuk melakukan diskriminasi, dijadikan alasan tindak kekerasan, bahkan sampai pada pembunuhan. Pembelaan biasanya sangat normatif dengan mengatakan bahwa agama mengajarkan perdamaian, menentang kekerasan, namun tidak jarang ada yang menyalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Pembelaan diri yang bersifat normatif ini tidak menyadari bahwa sebenarnya ada jarak antara 'yang seharusnya' dan 'yang faktual', antara ajaran dan praktek kehidupan beragama. Justru masalah yang perlu dihadapi adalah bagaimana menjembatani jarak itu supaya ajaran agama semakin terwujud dalam kehidupan dan bukan hanya menjadi alat pembenaran kekerasan atau legitimasi kekuasaan untuk kepentingan kelompok tertentu. Hal ini memperlihatkan bahwa ternyata meski agama menekankan perdamaian dan hormat akan martabat manusia, sebagai sistem ajaran, agama masih membuka peluang penafsiran yang mendukung bentuk-bentuk kekerasan. Para pemimpin agama, teolog, dan guru agama belum sampai pada titik penegasan bahwa apapun pembenarannya bila merendahkan martabat manusia, suatu penafsiran harus dipertanyakan keabsahannya. Ketidaktegasan ini memudahkan orang mencari pembenaran melalui agama.

Eksistensi agama sebagai sebuah institusi religius yang berfungsi sebagai penegak keadilan dan kedamaian sering mendapat sorotan tajam ketika muncul berbagai konflik sosial yang seolah-olah bernuansa agama. Agama dituding sebagai penyebab utama dari setiap konflik sosial yang pernah terjadi dalam ziarah peradapan bangsa Indonesia. Tuduhan ini seakan dibenarkan oleh kenyataan bahwa sering konflik sosial yang terjadi di tanah air ini penuh dengan ornamen-ornamen religius, entah berupa lambang-lambang bahasa untuk menyulut konflik atau perang, maupun berupa barang-barang fisik seperti pakaian atau atribut khas kelompok umat

beragama. Tambahan lagi ornamen-ornamen religius itu pada awalnya sangat berwajah sakral, sejuk dan mengesankan kedamaian, tetapi kemudian berubah kesannya menjadi sangat profan, ganas dan bernuansa permusuhan. Pada titik ini sebenarnya terjadi kesenjangan antara agama yang menganjurkan para pemeluknya untuk menghormati dan menghargai sesama manusia, dengan kenyataan lain yang justru menampilkan wajah agama yang menakutkan. Agama sering, bukannya mengelakkan konflik, tetapi malahan memberikan landasan ideologis dan pembenaran simbolis. Agama kerap menjadi sumber diskriminasi (Haryatmoko, 2010:82).

Berkaitan dengan kenyataan di atas, maka muncul pertanyaan yang menggugat eksistensi institusi agama yakni benarkah agama memang merupakan sumber konflik sosial? Ataukah konflik sosial ini semata-mata lahir karena ulah umat beragama yang mempolitikasi agama demi kepentingan tertentu? Pertanyaan ini begitu urgen karena kita semua mengetahui bahwa citra dasar semua agama adalah menginginkan keselamatan, kedamaian. Semua umat beragama mengakui bahwa agama manapun tidak pernah mendorong lahirnya kekerasan. Bagaimana mungkin ikhwal tujuan keselamatan bisa menjadi sumber konflik sosial atau kekerasan (Susetyo, 2002:82). Pertanyaan mendasar ini mesti ditelusuri agar kita tidak mudah terperangkap dalam opini publik yang mengklaim bahwa konflik sosial di bumi pertiwi ini murni disebabkan oleh agama.

Memang pada dasarnya kehadiran institusi agama sebagai pembawa damai atau keselamatan. Agama yang konkret adalah agama yang dihayati oleh pemeluknya dengan sistem ajaran, norma moral, institusi, ritus, simbol. Semua unsur yang memberi wajah konkret agama ini bisa mengkristal dalam bentuk penafsiran terhadap yang berbeda, maka sangat rentan terjadi pertentangan. Akibatnya citra dasar agama sebagai pembawa damai menjadi runtuh dan tidak bermakna ketika realitas faktual menunjukkan sering terjadinya konflik antar penganut agama. Agama sering diperalat menjadi landasan ideologis dan pembenaran simbolis bagi kekerasan (Tisera, 2002:74). Hal ini terjadi karena konflik dalam kehidupan bersama tidak diolah secara baik. Akibatnya muncul konflik dalam bentuknya yang paling ekstrem dan menakutkan. Dan justru konflik sosial antara kelompok karena perekat agama adalah konflik yang jauh lebih berbahaya. Bahkan lebih dasyat dari perang antara negara. Konflik antar agama sebenarnya terjadi karena ada kebencian,

dan karena tidak bisa menerima yang berbeda. Apapun yang dikatakan para pengamat bahwa ada kekayaan konflik itu, kebencian antara kedua penganut agama itu memang sungguh ada dan dirasakan (Priyatmoko, 2010:83). Provokasi tidak akan berhasil kalau kebencian tidak ada. Sedikit provokasi saja akan mudah membakar perilaku agresif atau kekerasan terhadap pemeluk agama lain. Ini semua terjadi karena orang ‘tidak bisa menerima yang berbeda’. Oleh karena itu, suatu kelompok sosial cenderung menjaga identitasnya agar tetap murni dan menolak yang berbeda. Konflik atau kekerasan muncul ketika setiap orang membentengi diri dengan sikap seperti ini.

Kita semua mengakui bahwa konflik karena perbedaan pendapat sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan perbedaan pendapat itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat untuk mencapai kedewasaan berpikir dan bertindak. Tanpa perbedaan pendapat, hidup manusia menjadi statis. Hal yang perlu diperhatikan adalah konflik yang muncul karena perbedaan pendapat mesti diolah secara baik sehingga menjadi roh yang menjamin dinamika atau dialektika kehidupan bersama. Oleh karena itu, perlu ada ruang dan wacana di mana masyarakat dapat menyalurkan ide atau gagasan, mengungkapkan kebingungan, ketidakpuasan dan ketakberdayaan hidupnya. Dengan itu, perbedaan pendapat yang berujung kekerasan tidak mungkin terjadi karena masyarakat menyalurkan pendapat secara lebih terbuka.

Ruang kebebasan berpikir dan berpendapat yang dicita-citakan setiap orang justru sangat tertutup atau tabu selama masa Orde Baru. Padahal menurut Arendt dalam Madung (2009:144–135), masyarakat modern terdiri dari individu-individu yang bersifat khas dan unik. Oleh karena itu, ruang kebebasan untuk berekspresi dan berpendapat harus mendapat tempat yang istimewa. Sebab kekhasan atau keunikan tersebut menjadi elemen penting dan dasar bangunan pluralisme sosial dan politik. Pluralisme bukanlah sebuah kecelakaan masyarakat modern ketika nilai-nilai kolektif hancur lebur dan tidak dapat diyakini lagi sebagai sebuah tatanan hidup bersama. Dikatakan demikian karena pluralisme lahir dari kodrat manusia. Secara kodrati setiap manusia adalah pribadi (*persona*) yang bersifat unik. Kekhasan itulah yang membedakan seseorang dari pribadi yang lain. Walaupun manusia itu unik, tetapi juga tetap membutuhkan pribadi yang lain. Ketergantungan manusia pada yang lain tidak

bersifat aksidental, tetapi substansial. Manusia hanya menjadi manusia sepenuhnya dalam relasi dengan manusia yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa manusia hanya mungkin menghayati kepenuhan dirinya dalam relasi atau komunikasi dengan pribadi yang lain. Walaupun demikian harus tetap disadari bahwa relasi dengan yang lain tidak pernah boleh melenyapkan keunikan atau kekhasan setiap pribadi. Ketika keunikan dan perbedaan ini tidak mempunyai tempat dan ruang dalam kehidupan bersama, maka sebenarnya ada kecenderungan untuk menegasi kodrat manusia sebagai pribadi yang unik dan mempunyai kebebasan untuk berekspresi serta sebagai pribadi yang selalu berada bersama yang lain. Akibat dari pentabuan kebebasan berpikir dan berekspresi ini, maka institusi politik, kehidupan ekonomi, pertahanan sosial mengalami stagnasi (tidak dapat berkembang dan bertumbuh).

Rezim penguasa Orde Baru sangat mengaksentuasi budaya uniformitas (budaya kesegaraman/keserasiaan) dan menganggapnya sebagai sebuah keniscayaan dalam hidup bersama. Adanya budaya ini justru menegasikan setiap bentuk perbedaan pendapat atau kekhasan setiap individu. Akibatnya apresiasi diri dan kepribadian setiap individu menjadi terhambat. Itulah sebabnya selama masa Orde Baru, term harmonisasi dianggap sebagai budaya yang harus dijalankan dalam segala aspek kehidupan bangsa dan negara (Tisera, 2002:74). Masyarakat Indonesia dipaksa untuk mengakui bahwa perbedaan pendapat secara terbuka dan langsung bukanlah budaya bangsa Indonesia. Itulah sebabnya, perbedaan pendapat tidak mendapat tempat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mencapai harmonisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka dibutuhkan suatu sikap monoloyalitas. Para penguasa mewajibkan rakyat untuk bersikap *nrimo* (membebek atau patuh secara buta).

Pemahaman dan penerapan harmoni yang salah kaprah ini memunculkan sikap yang memandang semboyan Bhineka Tunggal Ika dihayati sebagai suatu slogan kesatuan yang fasis (Fatah, 1994:5). Dalam konteks ini, menjaga harmoni sebenarnya tidak lebih dari kepentingan penguasa untuk mempertahankan status quo. Akibatnya, ketika perbedaan pendapat yang konstruktif tidak mendapat tempat dalam kehidupan bangsa ini, maka reaksi masyarakat pun menjadi sangat destruktif. Maka muncullah konflik dan kekerasan yang bernuansa destruktif. Konflik muncul dengan wajahnya yang paling keras

sebagai bentuk protes terhadap segala sesuatu yang dipendam dan direpresi secara paksa dalam jangka waktu yang begitu lama. Reaksi masyarakat atas realitas pentabuan perbedaan pendapat atau sikap oposisi justru melahirkan bentuk konflik sosial yang berbuntut pada tindakan kekerasan yang bersifat anarkis dan bahkan mengorbankan sekian banyak nyawa manusia. Sistem ini memunculkan ketidakpuasan dan akhirnya memicu konflik sosial yang cenderung menyeret-nyeret institusi agama. Sentimen agama seakan dijadikan kekuatan penggalangan massa. Agama dijadikan sarana politik sebagai bentuk protes atas berbagai persoalan (Susetyo, 2002:57–58), yakni (1) Proses demokratisasi, reformasi dan transformasi yang belum berjalan secara maksimal; (2) Eksploitasi alam di beberapa wilayah secara besar-besaran dan yang mengorbankan masyarakat sekitarnya (mega proyek Freeport di Irian Jaya, pertambangan emas, dll); (3) Pembangunan yang tidak merata di masing-masing daerah dan terlalu menekankan pertumbuhan ekonomi dan fisik, serta mengabaikan pembangunan martabat atau karakter manusia (*character building*); (4) Struktur hubungan kekuasaan yang sangat sentralistik; (5) Kekuasaan negara yang terlalu besar dan cenderung korup (*all power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*) dan melemahnya kontrol lembaga negara atas pemerintah; (6) Praktek korupsi yang semakin tak terbendung yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Inilah sejumlah persoalan yang menjadi sebab lahirnya berbagai protes masyarakat yang termanifestasi dalam bentuk konflik yang bernuansa kekerasan. Reaksi kontra yang dilakukan masyarakat ini akhirnya memunculkan pertentangan atau penolakan terhadap legitimasi kekuasaan lewat tindakan penyerangan terhadap segala simbol kekuasaan, baik yang fisik maupun yang non fisik.

Berdasarkan uraian di atas, kiranya menjadi jelas bahwa konflik sosial yang terjadi bukanlah murni konflik bernuansa agama, tetapi konflik yang terjadi sebenarnya sebagai bentuk protes atas berbagai kebijakan (*policy*) pemerintah yang diskriminatif dan tidak manusiawi karena tidak memihak kepentingan masyarakat pada umumnya. Dengan itu juga membantu kita untuk tidak mudah terjebak pada sikap yang hanya mempersalahkan institusi agama sebagai sumber utama konflik sosial dan mulai bersikap skeptis terhadap agama (Susetyo, 2002: 55). Walaupun demikian, hal ini tidak berarti mengurangi obyektivitas anggapan kita bahwa memang

agama mudah sekali diperalat manusia untuk menciptakan konflik sosial. Hal ini bisa saja terjadi karena ada ikatan emosional yang berpautan langsung dengan identitas keagamaan setiap umat beragama. Dan yang sering terjadi di Indonesia adalah sentimen agama dipakai untuk mengungkapkan ketidakpuasan masyarakat atas kebijakan pemerintah masa lalu yang menindas baik dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya dan religius. Maka tidak heran jika ada anggapan bahwa pemicu utama konflik yang terjadi adalah karena adanya kesenjangan ekonomi, pertarungan kekuasaan politik, atau kecemburuan sosial. Atas nama agama, masyarakat melakukan pembentakan terhadap praktek politik penguasa yang tampaknya sangat diskriminatif. Kebijakan yang hanya memberikan keuntungan kepada sekelompok orang yang kebetulan sebagian besar berasal dari etnis atau agama tertentu yang dekat dengan kekuasaan. Sementara kelompok atau etnis yang lain seakan tidak diperhitungkan atau dibiarkan terus melarat. Akibatnya orang yang kaya bertambah kaya dan masyarakat yang miskin menjadi semakin miskin dan tak berdaya dalam hidupnya.

Perlawanan terhadap sistem dan kebijakan pemerintah yang menindas atau menyengsarakan ini, membutuhkan suatu kekuatan massa. Dan cara yang paling mudah, cepat dan efektif untuk menggalang kekuatan massa adalah dengan menumbuhkan sentimen agama. Perlawanan yang sebenarnya ditujukan kepada pemerintah dengan segala kebijakannya yang menindas terproyeksi kepada perlawanan terhadap orang atau kelompok agama tertentu yang dipandang sebagai pihak yang mendapat profit dari sistem yang menindas tersebut. Fenomena inilah yang kemudian muncul ke permukaan dan seolah-olah ada satu perang antara agama. Sentimen agama mudah dibangkitkan dan menjadi pemersatu bagi sebuah perlawanan justru disebabkan karena cara hidup beragama dari umat beragama itu telah jatuh pada suatu bentuk formalisme agama (Susetyo, 2002:56). Artinya bahwa ketika sebuah agama dihayati secara formal saja, maka kesalehan yang muncul dari penghayatan itu adalah sebuah kesalehan individual, dan atau kesalehan kolektif yang sempit. Padahal kesalehan individual justru melahirkan keterpisahan antara hal-hal yang rohani dengan hal-hal yang duniawi. Agama menjadi terasing dari persoalan kehidupan manusia. Fungsi agama menjadi kabur. Agama yang seharusnya menjadi pembebas, malah terjebak pada aspek romantisme formal.

Ketika orang sudah terperangkap dalam bentuk penghayatan agama seperti yang diuraikan di atas, maka orang cenderung menjadikan agama sebagai alat politik untuk mencari popularitas, prestise, posisi, kedudukan dan kekuasaan dalam hidupnya. Cara beragama seperti ini hanya akan menghasilkan manusia yang buas, picik dan korup. Ketika setiap pemeluk agama mementingkan ritual atau aturan yang ketat, ia menjadi lupa akan hal-hal mendasar seperti keadilan, kasih dan kepekaan terhadap penderitaan sesama. Orang yang menghayati agama secara formal akan terjebak dalam membangun monumen hebat, tetapi penuh kemunafikan, penyelewengan dan ketidakadilan. Penganut agama yang benar adalah pribadi yang mampu menjaga keseimbangan antara ritual keagamaan dan praktek keagamaan dalam kehidupan yang riil.

Isu-isu agama, ras dan antargolongan telah menjadi momok yang paling ditakuti di Indonesia selama masa Orde Baru. Konflik primordial yang dilatarbelakangi oleh suku, agama, dan ras ini dilihat sebagai faktor yang membahayakan, faktor disintegrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini disadari oleh semua warga bangsa Indonesia dengan terus berusaha mencegah realitas ini sedapat mungkin. Usaha nyata dari kesadaran ini adalah kerja sama antarumat beragama dengan terus menerus mereposisi cara beragama supaya setiap agama tetap tampil dengan citra aslinya sebagai institusi penegak kebenaran, kedamaian dan keadilan.

REPOSISI CARA BERAGAMA: SUATU BENTUK PENCERAHAN DAN PENCERDASAN KEHIDUPAN BERAGAMA

Upaya untuk meminimalisasi setiap anggapan bahwa agama sebagai sumber utama konflik sosial, maka semua penganut agama hendaknya tetap concern pada semangat awal kehadiran agama-agama (Andang, 1998:8), yakni agama berperan untuk menerangi (iluminatif), kenabian (profetis), membebaskan (liberatif), dan mengubah (transformatif). Dengan itu, setiap pemeluk agama bebas dari lubang-lubang jebakan kultural yang membelenggunya dan yang sering mereduksikan dimensi-dimensi kemanusiaannya. Serendak dengan itu, setiap kaum beragama akan menjadi semakin memperhatikan ortopraksis (tindakan nyata) dalam menghidupkan nilai-nilai keagamaan dan bukannya hanya memperhatikan atau mempertahankan ortodoksi (ajaran agama). Disinilah, setiap pemeluk agama sebenarnya dituntut untuk menghormati

martabat manusia sebagai buah dari penghayatan atau aktualisasi ajaran agamanya.

Setiap umat beragama harus berani melakukan otokritik supaya tidak terjebak pada fenomena agama yang terlalu formalisme (Sutrisno, 1996:3). Dengan itu, keberagamaan kita tidak saja berwajah kesalehan individual, tetapi juga berdimensi kesalehan sosial. Wajah agama kita menjadi amat manusiawi, sebab orientasinya bukan lagi egoistik, tetapi mengandung relasi dengan sesama (altruistik). Pada titik inilah, agama ditantang untuk lebih merumuskan dan mengimplementasikan makna universalitasnya (Andang, 1998:41–42). Oleh karena itu, agama perlu mengkonkretisasikan makna universalitasnya dengan menerjemahkan ajaran-ajaran agama dalam tiga (3) etika universal yang rasional yakni prinsip sikap baik, prinsip hormat terhadap persona dan prinsip keadilan. Prinsip pertama mengharuskan setiap orang agar mendekati atau membangun interaksi dengan orang lain secara positif dan dengan kemauan yang baik (*political will*). Sedangkan prinsip kedua menghendaki orang agar dalam korelasi intersubjektifnya itu ada saling menghargai sebagai subyek, tidak saling mengobyeikkan. Prinsip ketiga mengharuskan semua orang untuk memperlakukan orang lain dengan perlakuan yang sama dalam situasi yang sama.

Hal-hal yang disebutkan di atas merupakan upaya yang mendesak bagi pencerdasan kehidupan beragama. Tugas setiap orang beriman kepada Tuhan dan beragama adalah membangun dan menyucikan dunia dengan menegakkan kemanusiaan manusia serta keadilan yang bermoral. Keberagamaannya bukan untuk kepentingan dirinya sendiri yang egoistik, tetapi sebaliknya bersifat altruistik. Atau dengan kata lain, orang yang memiliki religiositas hidup yang baik tidak saja memikirkan dirinya sendiri, tetapi justru memberikan diri untuk keselamatan orang lain. Iman yang kita miliki haruslah menghasilkan buah kebaikan, perdamaian, keadilan dan kesejahteraan. Inilah bentuk kecerdasan hidup beragama. Sebuah bentuk kehidupan ketika setiap orang yang beragama mau dan berani untuk mengkritisi agama sendiri dan mengkritisi praktek-praktek keagamaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Preferensi terhadap nilai-nilai kemanusiaan menjadi tolok ukur paling jelas dari cerdas atau tidaknya cara beragama dari seseorang (Susetyo, 2002:62–63).

Demi terwujudnya nilai-nilai kemanusiaan yang diperjuangkan setiap agama, maka setiap pemeluk agama harus menyadari kembali hakikat agama

yang sebenarnya. Hakikat agama yang terdalam adalah suatu bentuk relasi “dengan yang dunia yang tidak tampak” (Obon, 2012:288). Dunia itu adalah Yang Kudus yang bersifat imanen dan sekaligus transenden, dunia yang *tremendum* (menakutkan) dan *fascinosum* (menarik). Artinya Yang Kudus itu begitu dekat dengan manusia ciptaannya, tetapi sekaligus transenden. Dia sungguh menarik, sehingga disembah, tetapi sekaligus menakutkan (dalam pengertian timor *Domini*).

Hakikat agama sebagai bentuk relasi dengan Yang Kudus menjadi kabur manakala agama dijadikan alat dan menjadi ideologi yang membenarkan kekuasaan tertentu. Orang memakai agama untuk meraih sesuatu. Robert N. Bellah dalam Obon (2012:289) mengatakan bahwa agama menjadi sumber konflik jika agama direduksi bagi kepentingan di luar agama. Maka muncullah istilah fundamentalisme agama. Fundamentalisme dalam dirinya sendiri berarti usaha kembali ke semangat ajaran agama dalam bentuk penghayatan yang radikal. Namun, fundamentalisme dapat mengancam persatuan dan kesatuan jika disertai sikap menganggap remeh orang lain dan melihat keadaannya sebagai ancaman. Isu SARA menjadi alat ampuh dalam konteks ketimpangan distribusi pembangunan untuk meraih tujuan tertentu. Oleh karena itu, konflik primordial berdasarkan isu SARA berada di luar dimensi keagamaan. Itu berarti bahwa fundamentalisme tidak pernah murni religius atau agama.

Upaya untuk meminimalisasi eksek yang cenderung destruktif dari fundamentalisme, maka perlu menemukan paradigma baru agama dengan melakukan reposisi terhadap peran dan kehadiran agama yang sebenarnya. Tugas semua penganut agama adalah menunjukkan wajah agama yang damai dengan mengembangkan semangat toleransi, penerimaan pluralitas dengan kemauan untuk berdialog serta memperjuangkan perdamaian tanpa kekerasan. Inilah tiga (3) upaya untuk mereposisi cara beragama secara baik dan benar. Berikut ini dijelaskan tiga (3) keutamaan yang harus menjadi bagian integral dari upaya mereposisi cara beragama yang baik dan benar.

Menumbuhkan-kembangkan Semangat Toleransi

Term toleransi berasal dari kata bahasa Latin yakni *tolerare* (Dagun, 2006:1144) yang berarti tahan, bersabar. Maka toleransi menuntut keadilan yaitu keadilan menuntut agar setiap orang menerima apa yang merupakan haknya dan ini bukanlah hak

untuk keliru tetapi hak dari pribadi yang keliru. Selain itu, toleransi juga berarti membawa, memegang, menanggung, menyabarkan, menahan, membetahkan dan membiarkan, memelihara dengan susah payah dan mempertahankan agar hidup. Kata sifatnya *tolerans* yang berarti sabar, tahan dan betah. Oleh karena itu, kekuatan untuk menanggung, ketetapan, kegigihan, dan ketabahan yang membuahkan dan membela kehidupan tercakup dalam makna toleransi (Purnomo, 2002:3). Dengan demikian, secara etimologis, toleransi berarti suatu sikap, sifat atau semangat hidup dalam kebersamaan dan perjumpaan dengan orang lain demi membela kehidupan. Sikap toleransi selalu bernuansa positif yakni kereleaan untuk menanggung beban bersama, sabar, gigih, tabah, dan betah menghadapi hal-hal yang tidak mengenakan. Toleransi tidak identik dengan sikap kompromi, indifferen dan menghindari konflik. Inti terdalem dari toleransi adalah semangat, sikap sehati seperasaan dalam perbedaan dan pertentangan dalam kehidupan bersama. Dengan demikian, toleransi akan selalu menumbuhkan hidup bersama dalam kasih persaudaraan, bukan penolakan apalagi pengkhianatan dan perang. Semangat ini perlu diperjuangkan terus-menerus karena rasanya sikap ini sudah pudar dari kehidupan bersama kita sebagai bangsa. Ketika keutamaan ini hilang dari kehidupan kita, maka kita sebenarnya sudah kehilangan hati nurani dan perasaan dalam hidup bersama.

Toleransi dalam hidup bersama menjadi begitu urgen ketika kehidupan bersama lebih kuat diwarnai oleh konflik dan pertentangan, sikap saling curiga dan sikap arogan. Semangat toleransi dapat menghantar setiap umat beragama yang serba terbatas dan berbeda-beda untuk dapat saling menghargai, menghormati dan menerima. Dengan itu, terwujudlah kehidupan yang dijiwai oleh kasih persaudaraan sejati antar umat manusia, apa pun agama, warga bangsa, suku dan kebudayaannya. Dalam masyarakat plural, berbagai konflik dan pertentangan kerap terjadi sewaktu-waktu bagai bom waktu. Masalahnya karena setiap penganut agama sering menyangkal pluralitas perbedaan yang ada dan memaksakan orang lain untuk hanya mengakui kebenaran absolut yang ada dalam ajaran agamanya sendiri. Padahal sejatinya perbedaan itu harus tetap diakui dan diterima sebagai kenyataan sosial yang menuntut toleransi dalam hidup bersama.

Perbedaan tidak boleh dipandang sebagai sumber konflik, tetapi sebagai sumber energi positif yang dapat disalurkan untuk membangun dan memperbaiki

keadaan hidup sosial. Toleransi dalam hidup bersama mengandaikan adanya sikap terbuka atau inklusif. Semangat keterbukaan ini mesti berpangkal pada kesadaran diri manusia akan bisikan nurani yang benar, lurus, dan sehat untuk menerima, menghargai dan menghormati sesama sebagai pribadi yang berlebihan dan berkekurangan. Inilah sikap atau pilihan dasar dalam membina sikap toleransi. Toleransi menuntut kesediaan dan keberanian moral manusia untuk mengakui dan menerima perbedaan dalam hidup sehari-hari, tanpa menggunakan kekerasan. Perbedaan pada dasarnya memiliki rentetan keunikan dan keistimewaan sebagai kekayaan dalam hidup manusia. Kelebihan dan kekurangan pihak lain seharusnya diakui dan dihargai secara jujur. Sikap dasar toleransi akan terwujud jika setiap pemeluk agama sungguh menghargai kepribadian sesama dalam keunikannya. Setiap pribadi memiliki kebebasan interior dalam nurani, pikiran dan pendapat yang perlu mendapat tempat dalam konteks hidup sosial sambil memperhatikan kepentingan umum masyarakat (HU Kompas, 8/4/2003). Perbedaan hendaknya menjadi jalan untuk terciptanya kerja sama yang baik dan lebih terbuka.

Itulah sebabnya beragama berarti pengakuan akan keterbatasan suatu agama sebagai institusi pencarian karena agama dalam wajah manusia-winya terkait erat dengan keterbatasan manusiawi dan keterbatasan ruang dan waktu. Dengan itu, toleransi selalu berarti adanya sikap rendah hati untuk mengakui keterbatasan diri dihadapan kemahakuasaan Tuhan serta dihadapan orang dan atau institusi lain. Toleransi yang berhakekat kerendahan-hatian manusia itu ternyata berdampak positif baik bagi manusia dengan pluralitas agamanya maupun bagi agama itu sendiri. Bagi manusia secara umum, toleransi akan membawa kerukunan dan juga kerja sama demi kebaikan bersama (*bonum commune*). Sedangkan bagi agama itu sendiri, toleransi berarti pula memilih untuk bersikap terus mencari, tidak berkubang dalam kemapaman institusi. Dengan itu, agama menjadi lebih dinamis dan selalu dalam ziarah mencari kesempurnaan dalam kebersamaan.

Dalam konteks inilah, maka gerakan untuk revolusi mental dan revolusi spiritual bagi setiap pemeluk agama menjadi begitu penting demi terwujudnya semangat toleransi yang sebenarnya. Revolusi mental dan spiritual begitu penting sebab manusia terkadang terperangkap dalam sikap materilistik (mengejar kekayaan) dan hedonistik (mencari kenikmatan). Setiap pribadi perlu menyadari bahwa yang

dinilai dari manusia adalah perbuatannya. Perbuatan manusialah yang mengubah diri dan lingkungan hidupnya, bukan kata-kata dan pikiran manusia. Semangat toleransi mestinya tidak hanya sebagai slogan atau bersifat idealisme, tetapi mestinya menjadi semangat yang menjiwai kehidupan semua pemeluk agama. Sebab keinginan dan pemikiran tidak mengubah kehidupan manusia. Perbuatan atau tindakan nyata yang justru dapat mengubah kehidupan manusia. Kita boleh saja menguasai pengetahuan filosofis, normatif, historis mengenai apa yang baik dan tidak baik, namun jika pengetahuan itu didiamkan saja, maka tidak akan perubahan yang berarti dalam hidup manusia (HU Kompas, 29/10/2015).

Membangun Semangat Dialog Antaragama

Hal yang paling penting disadari dalam membina kerukunan antarumat beragama adalah mengakui adanya pluralitas bahwa masyarakat kita beranekaragam. Penerimaan pluralitas agama tidak dapat dipisahkan dari penerimaan kebebasan beragama (Priyatmoko, 2010:102). Masalahnya banyak pemeluk agama yang berpikir dengan menggunakan logika biner '*agama saya benar, jadi agama lain salah*'. Bagaimana pemeluk suatu agama bisa menerima, menghargai agama lain dan sekaligus menghayati sebagai otentik kebenaran agamanya? Pertanyaan ini sebenarnya berasal dari keprihatinan bagaimana agar semua agama menjadi lebih manusiawi dan menumbuhkan motivasi hidup beragama yang benar. Manusia perlu menghadapi perbedaan agama secara bijaksana agar bisa hidup bersama dalam suasana damai dan produktif. Inilah dasar untuk membangun sikap dialog. Dialog hanya bisa terjadi jika setiap pemeluk agama tidak tunduk pada tradisi, warisan dan latar belakangnya. Keyakinan iman setiap agama tidak melulu berasal dari pengaruh lingkungan, tetapi sungguh didasarkan pada landasan rasionalitas yang berasal dari suatu kedalaman diri. Landasan rasionalitas semacam ini mengandaikan bahwa setiap agama memiliki kekhasannya.

Keyakinan akan kekhasan yang dimiliki setiap agama semakin memperteguh identitasnya sehingga kehadiran agama lain tidak menjadi ancaman bagi keberadaan dirinya. Kekhasan suatu agama bukan sama sekali masalah superioritas. Jangan mencampuradukkan masalah kebenaran dengan argumen superioritas. Unik atau khas, yang berarti hanya satu-satunya dalam jenis itu, tidak identik dengan lebih hebat. Kita tidak bisa menghindari diri dan

menghapus keberagaman untuk mencapai homogenitas. Identitas tiap kelompok tetap dipertahankan tanpa membentuk suatu dialektika dalam pergaulan. Persoalannya adalah bagaimana kita bisa menciptakan kesadaran bersama sebagai suatu bangsa tanpa terkungkung dalam kotak eksklusif. Realitas kemajemukan agama yang ada di Indonesia meniscayakan adanya dialog. Dengan menjalankan dialog, masing-masing penganut agama semakin melangkah menuju ciri khas penghayatan imannya yang lebih menyapa, terbuka dan dialogis (Riyanto, 1995:17). Dialog merupakan cara terbaik untuk mempromosikan pemahaman yang lebih baik antara berbagai kelompok agama. Agama-agama harus mempunyai keterbukaan untuk bisa berdialog. Dialog tidak dimaksudkan supaya kita lebur menjadi satu. Kita bertemu agar sikap saling memahami antarpemeluk agama bertumbuh dan berkembang. Menumbuhkan kesadaran ini jauh lebih penting ketimbang membuat aturan bagi terciptanya kerukunan.

Selain itu, sikap penerimaan pluralitas agama-agama seharusnya dipahami dalam perspektif positif. Dalam arti bahwa pluralitas merupakan cara menampilkan lebih baik kesempurnaan Tuhan, tanpa harus jatuh di dalam bahaya relativisme (Priyatmoko, 2012:103). Kekhasan suatu agama akan semakin tampak melalui proses dialog dengan agama-agama lain. Dialog merupakan keterbukaan terhadap pihak yang lain. Dialog membantu secara lebih baik kekhasan setiap agama dan memberi motivasi untuk mencari dan mengenali Tuhan lebih dari sekedar konseptualisasi formal dari agama-agama masing. Dengan demikian, perbedaan akan diterima sebagai sarana untuk mengungkapkan kesempurnaan Tuhan. Menurut Schillebeeckx dalam Priyatmoko (2012:103), Tuhan begitu kaya dan sangat tak terbatas sehingga tradisi agama tertentu, yang dalam arti tertentu juga terbatas, tidak akan menimba habis kesempurnaan dan kepenuhan Tuhan. Pernyataan ini menjadi landasan dialog yang secara serius menghormati agama lain di dalam kekhasan dan kekayaan nilai-nilainya. Namun sekaligus juga mencegah suatu agama untuk menyatakan diri sebagai yang monopoli kebenaran.

Atas dasar itulah, maka untuk konteks sekarang ini, dialog yang perlu dilakukan adalah dialog kehidupan atau dialog tentang kehidupan, dan bukan hanya dialog spekulatif tentang Allah yang kadang berkesan sangat apologis (Andang, 1998:85). Dialog yang seharusnya berkembang saat ini adalah dialog

yang bersifat antropologis. Dengan demikian, dialog yang dibangun bersama antara agama-agama menjadi sungguh berpijak dan berpihak. Dialog semacam ini dapat membantu setiap umat beragama untuk menjadi lebih manusiawi, lebih religius, lebih mencintai sesamanya dan terutama lebih mencintai Sang Pencipta. Dialog selalu berorientasi pada usaha untuk mengatasi realitas saling mencurigai yang pernah terjadi. Serentak dengan itu, dialog menjadi sebuah jalan dialektika menuju pemurnian hidup bersama.

Walaupun demikian, masalah keyakinan yang bersifat teologis perlu juga didialogkan agar umat beragama dapat memahami agama orang lain dan berusaha mempelajari dan menafsirkan sejarah setiap agama dengan tepat. Dialog teologis ini tidak dalam konteks untuk mencari kelemahan atau kekurangan dalam agama yang lain, tetapi bertujuan untuk saling memahami dan mengakui perbedaan yang hakiki dalam setiap agama. Perbedaan agama mengajak untuk menerima keterbatasan manusia di dalam menangkap misteri Tuhan, misteri yang lain dan mengundang untuk menunda hasrat untuk mendominasi yang lain. Tentang hal ini, pernyataan Levinas dalam Priyatmoko (2012:104) menjadi relevan yakni hubungan tidak menetralkan yang lain, tetapi memelihara otentisitas yang lain. Yang lain sebagai yang samasekali lain tidak merupakan obyek yang menjadi milik kita atau cair bersama saya menjadi kita. Sebaliknya, yang lain menarik diri ke dalam misterinya. Pernyataan ini mau mengatakan bahwa perbedaan antar agama tidak bisa dipecahkan dalam bentuk pernyataan seakan-akan mereka saling melengkapi. Kesalingan yang berakar pada kelemahan merupakan bentuk pengobyeakan. Perbedaan-perbedaan teologi yang tidak bisa dipertemukan memang ada, tidak perlu disangkal. Dialog bukan berarti menganeksasi yang lain atau menolak yang lain, tidak pula untuk memaksakan sudut pandangnya. Dialog tidak bisa direduksi hanya menjadi masalah ketidakjelasan semantik atau masalah perbedaan perspektif. Kalau anggapannya demikian berarti seakan-akan bisa dipecahkan dengan memberikan klarifikasi di dalam penggunaan istilah atau konsep. Orang harus memperbaharui pemahaman bahwa yang berbeda atau yang lain bukan merupakan bagian saya, tidak mirip dengan saya, tetapi sungguh suatu kesadaran yang ada di luar saya, tetapi saya sangat menghormatinya. Inilah konsep kesadaran berdialog yang sebenarnya. Oleh karena itu, perlu ada keberanian untuk memulai suatu

bentuk dialog yang bertujuan untuk saling memahami dan mengakui perbedaan serta untuk pemurnian hidup bersama. Pemurnian hidup bersama untuk mencapai kedewasaan masing-masing pemeluk agama justru terjadi dalam perjumpaan yang saling meneguhkan dan menguatkan dengan sesama yang lain. Oleh karena itu, dialog membutuhkan komitmen sejati dan menyingkirkan berbagai prasangka buruk atau negatif. Kesempatan dialog merupakan moment membangun komitmen baru untuk menghargai diferensitas atau keberbedaan dalam hubungan antara agama-agama.

Menyadari pentingnya dialog antar umat beragama ini, maka Gereja Katolik sejagad sukses menerjemahkan ajaran kasih Yesus Kristus di dalam sebuah aspek misi GerejaNya yakni dialog dengan umat beragama lain di dalam atmosfer keterbukaan dan ketulusan yang dilandasi kasih dan kebenaran oleh karena iman akan Kristus. Dengan itu, Gereja Katolik menghidupkan dan mengembangkan sebuah dinamika baru yang tepat untuk menyumbangkan bagiannya yang paling penting demi pengembangan kemanusiaan yang beradab dan demi kesejahteraan bersama. Kekerasan adalah musuh kekristenan. Dialog dan tukar pikiran sambil menjalin persahabatan dan kekeluargaan atas dasar kasih adalah jalan yang benar dan harus ditempuh kalau ingin hidup damai dan harmonis. Inilah pokok pewartaan ketika Gereja giat memajukan dialog antar umat beragama dan bukan sebuah upaya proselitisme atau tindak propaganda untuk pindah agama. Sebagai salah seorang penasehat di dalam Konsili Vatikan II, Josef Ratzinger yang kemudian dikenal dengan Paus Benediktus XVI, turut memaklumi segala dokumen Gereja yang dikeluarkan pada masa Konsili Vatikan II, termasuk *Nostra Aetate* yang diumumkan tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1965 (Kewuta, 2013:285). Di dalam *Nostra Aetate* (NA 2), Gereja Katolik berikrar:

Tidak menolak apapun, yang ada dalam agama-agama itu serba benar dan suci. Dengan sikap hormat yang tulus, Gereja merenungkan cara-cara bertindak dan hidup, kaidah-kaidah serta ajaran-ajaran, yang memang dalam banyak hal berbeda dari apa yang diyakini dan diajarkannya sendiri. Tetapi tidak jarang toh memantulkan sinar kebenaran, yang menerangi semua orang. Namun Gereja tiada hentinya mewartakan dan wajib mewartakan Kristus, yakni “jalan, kebenaran dan hidup (Yohanes 14:6). Dalam Dia, manusia menemukan kepenuhan hidup keagamaan, dalam Dia pula Allah mendamaikan segala sesuatu dengan diri-Nya.

Itulah sebabnya Paus Benediktus XVI dengan caranya yang sangat teliti dan akurat, mengembangkan dan menghidupkan dialog antar umat beragama selama delapan tahun pontifikalnya dan tidak henti-hentinya berjuang untuk meletakkan dasar kekristenan yang solid melalui telaahan-telaahan teologisnya, agar di dalam dialog tidak terjadi kebimbangan, ketidaktahuan, kecocok-kaciran identitas dan lebih lagi sinkretisme teologis.

Relevansi dialog antar umat beragama yang dicanangkan *Nostra Aetate* tahun 1965 selama Konsili Vatikan II kini digarisbawahi sekali lagi oleh Paus Fransiskus di dalam era kepemimpinannya (Kewuta, 2013:284–285). Itu berarti gema *Nostra Aetate* tetap nyaring. Bagi Paus Fransiskus, dialog antar umat beragama dalam rangka menyelesaikan problematika kehidupan bersama tidak saja direduksi menjadi tugas sebuah partai politik atau tugas pemaju-pemaju gerakan *Justice and Peace* atau intensi adorasi untuk kesalehan pribadi, melainkan hendaknya menjadi perhatian bersama lintas agama (*common concern*) yang tentunya bergema luas terhadap restorasi peradaban dunia. Oleh karena itu, ketika membaca gerak awal kiprah Paus Fransiskus ada harapan bahwa dialog merupakan kebutuhan dan keharusan atau harus berjalan terus dalam membangun relasi atau hubungan gereja dengan agama-agama bukan kristiani. Berkaitan dengan hal itu, maka bisa saja sisi kolaborasi lintas agama untuk perbaikan situasi sosial akan menjadi proyek utama selama masa pelayanan Paus Fransiskus, atau sisi rangkulan persahabatan ala Yohanes Paulus II yang akan menjadi targetnya, atau opsi peletakan landasan teologis ala Paus Benediktus XVI yang dijadikan sebagai prioritas dalam langkah strategi pengembangan semangat dialog antar umat beragama.

Sekalipun demikian, jika program pastoral Paus Fransiskus untuk dialog antar umat beragama bisa lebih menandakan *resiprositas* (ketimbalikan) dan mencapai *grassroots level* (akar rumput), maka umat berbagai agama di seluruh dunia ibarat sedang memegang sapu ijuk dan giat menyapu-bersih pekarangannya sehingga “ketentraman” dan “kebersihan” (perdamaian dan keharmonisan) ditegakkan dari bawah. Dengan ini potensi perdamaian dunia lebih real, karena justru *grassroots level* adalah wilayah abu-abu yang menurut pengalaman berbagai negara dunia masih sering diabaikan, padahal lebih memungkinkan terjadinya konflik sosial bernuansa SARA.

Upaya membangun dialog antar umat beragama ini perlu dikembangkan dalam suatu semangat yang disebut dengan spiritualitas *passing over*. *Passing over* lintas agama dan keyakinan adalah satu kemampuan untuk berdialog dengan agama atau keyakinan-keyakinan yang lain (Obon, 2012:7–8). Salah satu aspek pluralitas suatu komunitas ialah bervariasinya keyakinan agama yang dianut oleh para anggota suatu komunitas. Kehadiran berbagai agama dan keyakinan dalam suatu komunitas pluralis, dari satu pihak bisa dilihat sebagai satu kekayaan dan bersifat positif. Namun dari pihak lain, juga bisa menjadi tantangan yang berbahaya bagi keyakinan-keyakinan atau agama-agama yang bersangkutan satu terhadap yang lain. Kemampuan setiap individu atau kelompok untuk ber-*passing over* lintas keyakinan dan agama ini akan sangat besar peran dan pengaruhnya terhadap keharmonisan hubungan di antara para pendukungnya. Selain itu, menjadi sumber kekuatan bagi eksistensi atau keberadaan hidup dari setiap agama atau keyakinan. Dengan kata lain, spiritualitas *passing over* memungkinkan keyakinan-keyakinan dan agama-agama yang berbeda bisa hidup berdampingan secara damai dalam suasana dialog saling menerima dan mengakui kehadiran masing-masing. Dalam suasana dialog seperti itulah para penganut agama-agama dan keyakinan-keyakinan yang berbeda itu merayakan perbedaan untuk saling memperkaya satu sama lain. Itu berarti bahwa spiritualitas *passing over* menjadi salah satu instrumen yang efektif untuk merajut kembali kemanusiaan yang sudah dikeping-keping dan bahkan sudah dikapling-kapling karena perbedaan agama.

Memperjuangkan Perdamaian Tanpa Kekerasan (*non-violence*): Opsi Setiap Agama

Setiap kaum beragama dipanggil untuk memperjuangkan perdamaian, bukan menciptakan permusuhan atau peperangan. Panggilan ini menjadi sebuah keniscayaan dalam konteks pluralitas agama di Indonesia. Memang agama yang sejati adalah agama yang berwajah damai, yang saling menghormati dan mengusahakan kesejahteraan hidup bersama. Usaha ini dilakukan agama bukan dengan kekerasan. Setiap agama mempunyai komitmen dasar yakni anti kekerasan. Bahwasannya kekerasan tidak dapat menyelesaikan kekerasan, tetapi malah membuat kekerasan menjadi lingkaran setan untuk melakukan tindakan balas dendam (Sutrisno, 1996: 3). Semua agama mempunyai keyakinan dasar

bahwa kekerasan bukanlah instrumen untuk menyelesaikan konflik atau perbedaan dengan orang lain. Semua agama berkeyakinan bahwa kekerasan sangat bertentangan dengan kehendak Allah. Tuhan tidak pernah mengizinkan atau membenarkan penggunaan kekerasan untuk menegakkan keadilan (Gensichen dalam Zaman, 2005:239).

Agama harus mampu menjadi kekuatan yang efektif bagi terciptanya perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, ada dua hal paralel yang harus dilakukan sekaligus yakni membebaskan agama sebagai penyebab hubungan-hubungan politik dan komunal, serta menempatkan agama sebagai agen rekonsiliasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap agama harus bersedia menerima pluralitas atau keragaman sebagai kebajikan sosial (*social virtue*). Karena tiap individu berbeda satu sama lain, maka perbedaan merupakan bagian fundamental dalam tatanan sosial mana pun. Sebab jantung kultur perdamaian adalah pengelolaan yang kreatif atas perbedaan yang terdapat dalam kehidupan manusia.

Dalam usaha menciptakan perdamaian, dan bukan perang atau kekerasan, setiap pemeluk agama dituntut untuk mengetahui dan mengimplementasikan empat (4) soko guru perdamaian dalam jiwanya (HU Kompas, 13/2/2003), yakni: (1) Kebenaran. Kebenaran senantiasa menumbuhkan perdamaian jika setiap orang secara tulus mengakui hak dan kewajibannya terhadap sesama manusia; (2) Keadilan. Keadilan dapat membangun perdamaian bila dalam pelaksanaannya setiap orang menghormati hak orang lain dan benar-benar melaksanakan tugasnya; (3) Cinta Kasih. Cinta Kasih menciptakan perdamaian bila orang mengalami bahwa kebutuhan orang lain juga merupakan kebutuhannya sendiri dan membagikan hartanya pada sesama terutama nilai-nilai akal budi dan semangat hidupnya; (4) Kemerdekaan. Kemerdekaan dapat membangun perdamaian dan membuatnya berkembang bila dalam memilih sarana untuk tujuan itu, manusia bertindak sesuai dengan akal dan bertanggungjawab atas tindakannya. Mengendalikan realitas konflik sosial atas nama agama merupakan usaha nyata untuk menegakkan keempat soko guru perdamaian dalam kehidupan yang nyata.

KESIMPULAN

Ketika realitas kehidupan bangsa kita diwarnai berbagai macam konflik sosial, maka agama sering dituduh sebagai penyebabnya. Sentimen agama

sering digunakan untuk kepentingan kelompok atau pihak-pihak tertentu. Ketika agama direduksi sebagai penyebab lahirnya kekerasan, maka agama kehilangan daya sebagai sumber inspirasi rohani bagi para pemeluknya. Atas kenyataan ini, kita perlu bertanya apakah agama sudah mempunyai pengaruh liberatif (membebaskan) dalam konteks sosial kemasyarakatan? Atau justru sebaliknya, gejala euforia beribadah kaum beragama sama sekali tidak mempunyai dampak membebaskan dan mensejahterakan bagi kehidupan masyarakat dan bangsa. Buktinya bahwa kendati semua orang di Indonesia mengaku beragama, namun negeri ini justru terkenal karena prestasi kekerasan/konflik sosial bernuansa agama. Agama dimanfaatkan dalam setiap konflik sosial.

Realitas yang digambarkan di atas mengindikasikan bahwa agama belum diposisikan pada tempat yang sebenarnya. Agama masih disubordinasikan pada aneka kepentingan lain. Orang-orang yang dengan lantang mengaku beragama, justru memperalat agama untuk kepentingan individu atau kelompok yang bersifat momental. Praktek-praktek seperti ini merubah citra agama yang berwajah damai dan menyelamatkan menjadi agama yang berwajah kekerasan, pembunuh, pemaarah, eksklusif dan diskriminatif.

Dalam konteks di atas, menjadi logis kalau masing-masing agama lalu berkuat dengan urusannya sendiri, dan ekstra sibuk dengan persoalan-persoalan internal. Ruang pribadi seorang pemeluk agama bukanlah di dalam dunia yang luas, melainkan dalam lingkungan intern agamanya. Akibatnya muncul berbagai bentuk fundamentalisme dan formalisme agama. Dan ketika penganut agama terperangkap dalam situasi ini, maka agama yang dihayatinya tidak mempunyai daya kekuatan sebagai pembebas dari setiap aspek keterkungkungan hidup konkret manusia sekarang dan disini (*hic et nunc*). Agama lalu menjadi semakin disfungsi dalam kehidupan masyarakat. Wibawa agama memudar dan posisinya semakin surut ke belakang.

Berhadapan dengan realitas di atas, semua umat beragama perlu mengkaji atau menafsir ulang posisi dan peran agamanya dalam kehidupan bersama. Setiap umat beragama perlu melakukan retrospeksi, introspeksi dan prospeksi atas kehidupan beragamanya, sehingga menemukan cara beragama dan beriman yang sebanarnya. Setiap agama perlu secara terus menerus mengembangkan semangat toleransi, semangat dialog yang konstruktif serta memperjuangkan perdamaian tanpa kekerasan.

Inilah saatnya setiap penganut agama kembali memuliakan Tuhan dengan mereposisi atau mendudukan kembali religiositas keberagamaannya bagi dan dalam pengabdian kepada manusia. Sebab beragama berarti memuliakan Tuhan dengan memanusaiakan manusia (*Gloria Dei Homo Vivens*).

DAFTAR RUJUKAN

- Andang, Al. 1998. *Agama yang Berpijak dan Berpihak*. Yogyakarta: Kanisius.
- Dagun, M.S. 2006. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara
- Daven, M. 2013. "Agama dan Politik - Hubungan yang Ambivalen Dialog Versus Benturan Peradapan", dalam *Jurnal Ledalero*, Vol.12 No. 2.
- Dokumen Konsili Vatikan II Pernyataan Tentang Hubungan Gereja Dengan Agama-agama Bukan Kristiani (Nostra Aetate, 2).
- Fatah, E.S. 1994. *Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Gensichen, D.H.W. 2005. "Perang dan Damai dalam Agama", dalam Zaman Ali Noer (eds.), *Agama untuk Manusia*. Malang : Averoes Press dalam kerjasama dengan Pustaka Pelajar Yogyakarta (Anggota IKAPI).
- Haryatmoko. 2010. *Dominasi Penuh Muslihat - Akar Kekerasan dan Diskriminasi*. Jakarta : Gramedia
- HU Kompas* 13/2/2003.
- HU Kompas* 29/10/2005.
- HU Kompas* 8/4/2003.
- Kewuta, Solo, Markus. 2013. "Dialog : Tribute untuk Paus EM. Benediktus XVI, dalam *Jurnal Ledalero*, Vol 12, No. 2.
- Madung, O.G. 2009. "Teror, Pluralisme dan Konsep Hidup Bersama", dalam *Jurnal Ledalero*, Vol.8, No.2.
- Obon, F. 2012. *Agama Flores, Politik Flores - Dinamika Kehidupan Agama dan Politik di Flores*. Ende : Nusa Indah.
- Purnomo, B., Aloysius. 2002. *Jalan-jalan Toleransi demi Kasih dan Keadilan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Riyanto, A. 1995. *Dialog Agama dalam Pandangan Gereja Kristen Katolik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Susetyo, B. 2002. *Membuka Mata Hati Indonesia*. Malang: Averoes Press.
- Tisera, G. 2002. "Peranan Gereja dalam Pencegahan dan Penyelesaian Konflik" dalam Tisera Guido, *Mengolah Konflik Mengupayakan Perdamaian*. Ledalero: LPBAJ.